

PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh: Yosa Saputra

Email: Yosaputr@gmail.com

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

2829-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia, Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Karena program ini berusaha untuk membantu meringankan beban tanggungan dan mengubah perilaku hidup keluarga miskin (KM) dengan cara memberikan bantuan tunai untuk membayar kebutuhan, sasaran program ini di peruntukan untuk Keluarga Miskin (KM) yang memiliki syarat sebagai penerima bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan sendiri di Kecamatan Tembilahan sudah berjalan semenjak tiga tahun terakhir ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dan apa saja faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Teori digunakan adalah teori Manajemen George R. Terry mengenai prinsip-prinsip manajemen yaitu planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Metode penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan yang dilakukan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui sejauh pelaksanaan program ini sudah berjalan dengan baik. Dimana prosedur pelaksanaannya telah di lakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada di dalam pedoman pelaksanaan PKH, dimana PKH ini memiliki empat tahap pelaksanaan dari awal hingga akhir yang meliputi validasi, penyaluran bantuan, pertemuan kelompok, dan verifikasi. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan terhadap pelaksanaan program ini yaitu sosialisai dan sarana prasarana dimana kedua faktor ini memegang peran penting terhadap kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini. Dapat di simpulkan bahwa pengelolaan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan sudah cukup baik.

Kata Kunci : Pengelolaan, Program Keluarga Harapan (PKH)

**PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN
TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Oleh: Yosa Saputra

Email: Yosaputr@gmail.com

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si

**Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
2829-Telp/Fax. 0761-63277**

Family Hope Program (PKH) is a policy issued by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia as a form of government's seriousness in accelerating poverty reduction in Indonesia. This program aims to develop social protection system for the poor in Indonesia. As the program seeks to help alleviate the burden of dependents and change the lives of poor families (KM) by providing cash assistance to pay for the need, the program's target is in the designation for Poor Families (KM) who have the conditions as beneficiaries in education and health.

The implementation of the Family Hope Program in Tembilahan Sub-district has been running since the last three years. The purpose of this research is to know how the management carried out by the agency responsible for the implementation of Family Hope Program (PKH) in Tembilahan Sub-district Indragiri Hilir Regency and what are the constraining factors in the management of Family Hope Program (PKH) in Tembilahan Sub-district Indragiri Hilir Regency. Theory used is Management theory George R. Terry about the principles of management that is Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. The research method is descriptive qualitative to get a clear picture about the management that is done related to the implementation of Family Hope Program (PKH). Data collection techniques used interview techniques, observation, and documentation.

Based on the results of research can be known as far as the implementation of this program is running well. Where the implementation procedure has been done in accordance with Standard Operating Procedures in the implementation guidelines PKH, where PKH has four stages of implementation from beginning to end which includes validation, aid distribution, group meetings, and verification. Factors that affect the management of the implementation of this program are socialization and infrastructure facilities where these two factors play an important role in the smooth and successful implementation of this Family Hope Program. Can be concluded that the management related to the implementation of Family Hope Program (PKH) done is good enough.

Keywords: Management, Family Hope Program (PKH)

A. LATAR BELAKANG

aMasalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang enantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengan kita saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju.

Kemiskinan digambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti, sandang, pangan dan papan. Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini disebabkan orang miskin tidak memiliki biaya untuk mengakses berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan akses kesehatan yang layak.

Untuk mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok paling miskin. Dengan adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi peserta PKH. Adapun program ini berupa bantuan tunai yang diberikan dalam 4 (empat) tahap selama 1 tahun sesuai deanga komponen peserta penerima.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tembilahan Kota?
2. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tembilahan Kota?

C. MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tembilahan Kota.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tembilahan Kota.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu administrasi publik dalam kajian pengembangan dalam pembangunan.
 - 2) Sebagai suatu sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah,

sistematis dan metodologis penulis dalam menyusun berbagai kajian literatur untuk menjadikan suatu wacana baru dalam memperkaya khazanah kepustakaan pendidikan.

b. Secara praktis

- 1) Dalam hal ini memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama bagi mereka yang secara serius mengamati jalannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan serta dapat dijadikan sebagai kontribusi terhadap pemecahan permasalahan yang terkait dengan program tersebut.
- 2) Penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan implementasi Program Keluarga Harapan, dapat pula dijadikan sebagai masukan bagi pihak Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan peran serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan

D. Konsep Teori

1. Administrasi

1.1 Pengertian Administrasi

Administrasi dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam artian sempit, administrasi hanya terbatas pada aktifitas ketatausahaan yaitu kegiatan penyusunan informasi secara sistematis dan pencatatan semua

keterangan yang diperoleh dan diperlukan sesuai dengan hubungannya satu dengan yang lain. Sedangkan dalam arti luas, administrasi mencakup organisasi dan manajemen (Albert Lepawsky 2007: 22). Dengan demikian pekerjaan administrasi lebih dari sekedar penyusunan dan pencatatan informasi saja, melainkan mencakup aktifitas pembimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap upaya sekelompok orang ke arah pencapaian tujuan bersama.

2. Manajemen

2.1 Pengertian Manajemen

Menurut Soewarno Handyaningrat (1997:9) Manajemen bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Manajemen bisa diartikan Pengelolaan, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Menurut George R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa Manajemen yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja

secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

3. Program

3.1 Pengertian Program

Siagian (1986:124) mengatakan bahwa *“Penyusunan program kerja adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu”*

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi oleh para ahli :

Pariata Westra (1989:236) yang mengatakan bahwa *“Program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya”*

Hal yang sama dikemukakan oleh Sutomo Kayatomo (1985:162) yang mengatakan bahwa *“Program adalah rangkaian aktifitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan”*

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan permasalahan atau khusus yang ditemukan berdasarkan fakta dengan berpijak pada fakta yang bersifat khusus

kemudian diteliti untuk dipecahkan permasalahannya dan ditarik kesimpulan secara umum.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tembilahan dan yang menjadi titik fokus yaitu pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tembilahan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai sekarang.

2. Informan penelitian

Kriteria dalam *key informan* dalam penelitian adalah mengetahui dengan baik Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Adapun yang dijadikan *Informan* yang dianggap mengetahui dengan mendalam serta dapat memberikan keterangan yang sangat dapat dipercaya tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Selanjutnya *Informan* ditentukan dengan menggunakan metode *Snowball sampling* atau bola salju, yaitu suatu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya.

kecil kemudian mebesar. Dalam penentuan *informan* pertama-tama dipilih satu dua orang, tetapi karena denagn dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Sugiono (2007:97).

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diambil langsung dari informan yang menjadi sampel sebagai data untuk menganalisa penelitian dan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara keseluruhan informan yang mengenai pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tembilahan.

- b. Data Skunder adalah data

penunjang dalam penelitian mengenai pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tembilahan yang diperoleh berdasarkan laporan pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tembilahan, yaitu data yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) yaitu dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti mengenai pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tembilahan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat dan mencatat kejadian. Zuriah (2009:173), mengatakan Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian

b. Wawancara

Menurut Zuriah (2009:179) wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, ciri utamanya dari wawancara adalah pencari informasi (*interviewer*) dari sumber informasi (*interviewe*). Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi terhadap permasalahan yang terjadi. Teknik wawancara pada penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam dengan informan penelitian. Wawancara mendalam adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa rekaman atau photo-photo yang dapat diartikan sebagai data yang dipersiapkan guna keperluan tertentu dan ini juga sebagai bukti pendukung dalam melakukan penelitian. Menurut Usman (2009:69) teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menganalisis data-data yang didapat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun sehingga dalam analisis data kualitatif tidak menggunakan perhitungan matematis atau teknik statistik sebagai alat bantu analisis, data kualitatif akan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan mengenai bagaimana pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tembilahan, berdasarkan fakta dan data kualitatif yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, yang di trianggulasikan, untuk kemudian bisa menarik suatu kesimpulan hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilahan sudah berjalan sejak tahun 2014 , tujuan dari

pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) sendiri yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Tembilahan itu sendiri. Namun pada proses pelaksanaan nya program keluarga harapan (PKH) tersebut masih kurang efektif karena masih banyak data masyarakat yang seharusnya menerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) tersebut, yang mana program keluarga harapan (PKH) itu sendiri merupakan program bantuan untuk keluarga miskin.

Melihat tidak sesuai nya antara harapan dan kenyataan dari pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) tersebut, dimana program tersebut sudah berjalan empat tahun terakhir, penulis ingin melihat pengelolaan program keluarga harapan (PKH) dengan menggunakan fungsi-fungsi Manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah menentukan kegiatan, program, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan serta cara-cara menegrijakannya. Perencanaan merupakan awal dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi baik secara umum dan secara khususnya berkaitan dengan visi, misi dan program serta kegiatan pendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditentukan. Mengenai perencanaan yang akan dilakukan peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai berikut :

“Dalam perencanaan yang berkaitan program pelaksanaan PKH kami berpedoman pada pedoman pelaksanaan PKH yang dimulai dari validasi, penyaluran bantuan, pertemuan kelompok dan verifikasi. validasi itu dilaksanakan satu kali dalam setahun, dimana validasi merupakan salah satu kewajiban pendamping di lapangan dalam

menetapkan apakah calon KPM tersebut berhak menerima bantuan PKH atau tidak. untuk tanggal atau jadwal tetap itu bersifat fleksibel mengikuti instruksi dari pusat, karena validasi ini bersifat menyesuaikan dan memastikan peserta yang ada di data pusat benar dan ada. Begitu juga untuk perencanaan penyaluran, biasanya penyaluran dilakukan setiap 3 bulan sekali setelah validasi dan waktu pelaksanaannya pun menunggu SK dari pusat. Jika SK sudah keluar, maka kami di berikan waktu satu minggu untuk mempersiapkan penyaluran bantuan. Dan diintruksikan kepada setiap pendamping untuk menghubungi ketua kelompok peserta penerima bantuan PKH untuk memberikan informasi penyaluran. Dan setelah penyaluran dilakukan, menjelang 3 bulan sebelum dilakukan verifikasi, kami mengintruksikan kepada setiap pendamping kecamatan agar melakukan pertemuan kelompok guna menampung saran dari para peserta terhadap kekurangan pada pelaksanaan. Selanjutnya verifikasi dilakukan oleh pendamping program untuk memastikan apakah bantuan digunakan sesuai dengan kriteria penerima. Verifikasi disini ada verifikasi fasilitas pendidikan dan verifikasi fasilitas kesehatan. (Wawancara dengan Bapak Syaiful Kelana S.Pd Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, 07- Juli-2017)

Kemudian untuk menambah informasi berkaitan dengan perencanaan kegiatan, peneliti melakukan wawancara dengan Koordinator PKH Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan penentuan kepesertaan PKH, sebagai berikut:

“Kepesertaan PKH pada awalnya ditentukan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik sebagai pegangan informasi jumlah kemiskinan yang ada di setiap daerah, dan selanjutnya data tersebut dikirim ke setiap daerah untuk dilakukan validasi atau pengecekan ulang.

Dikarenakan PKH ini adalah bantuan tunai bersyarat, maka pendataan peserta pun harus menyesuaikan dengan kriteria dan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Jika ada seseorang yang termasuk dalam data dan saat dilakukan validasi ia tidak memenuhi syarat dan Kriteria PKH maka ia tidak akan menjadi peserta PKH. dan pernah ada temuan peserta yang terdata sebagai kelompok miskin namun secara ekonomi pada saat pendamping kami melakukan validasi ia tergolong orang yang mampu, maka kita akan memberi laporan kepada pusat pada saat final closing begitu juga jika menemukan bahwa ada masyarakat yang secara kriteria memenuhi kriteria kepesertaan dari PKH ini, maka kita akan melaporkan ke pusat agar masyarakat tersebut terdaftar menjadi peserta penerima bantuan. Untuk itulah validasi dilakukan sebelum waktu penyaluran".
(Wawancara dengan Bapak Mirza Padmaraga Koordinator PKH Kabupaten Indragiri Hilir, 07-Juli-2017)

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang rencana kegiatan, yang akan dilakukan pendamping, peneliti juga melakukan wawancara dengan pendamping Kecamatan PKH Tembilahan Kota, sebagai berikut :

"Dalam pelaksanaan PKH itu terdiri dari empat tahap inti, yang terdiri dari validasi, penyaluran, verifikasi dan pertemuan kelompok. Saya sebagai pendamping terlibat langsung di semua tahap tersebut, untuk perencanaan seperti tanggal setiap kegiatan itu dilakukan itu bersifat fleksibel saja. Karena ketentuan jadwal kegiatan itu berdasarkan buku pedoman pelaksanaan PKH, mulai dari validasi yang dilakukan satu kali dalam setahun, penyaluran bantuan dilakukan setiap tiga bulan sekali selama empat kali dalam satu tahun, selanjutnya verifikasi yang dilakukan menjelang penyaluran selanjutnya atau biasanya dilakukan setelah 1 bulan penyaluran. Selanjutnya adalah pertemuan

*kelompok yang dilakukan setiap bulan, yang biasanya saya lakukan pada saat hari libur kerja pada hari Sabtu atau Minggu"***(Wawancara dengan Kak Faizah Husna S.Pd Pendamping PKH Kecamatan Tembilahan Kota 09-Juli-2017)**

Kesimpulan dari hasil wawancara keseluruhan yang dilakukan dalam penelitian ini mengenai perencanaan yang berkaitan dengan penyusunan program kerja. Penyusunan program kerja PKH di Kecamatan Tembilahan ini dalam perencanaan dan pelaksanaannya berpedoman pada buku pedoman pelaksanaan PKH, untuk itu segala kegiatan mengenai pelaksanaan mengikuti rencana pelaksanaan yang ada, pihak unit pelaksana hanya melaksanakan kegiatan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan. Sebagaimana yang dijelaskan pada kutipan wawancara, bahwa pelaksanaan dari PKH ini memiliki 4 tahap inti yang terdiri dari validasi, penyaluran bantuan berupa dana tunai, verifikasi, dan pertemuan kelompok. Dalam perencanaan kegiatannya validasi memiliki jadwal yaitu dilakukan 1 tahun sekali pada setiap memasuki tahun baru. Dengan adanya validasi diharapkan agar bentuk kesalahan data peserta bisa di koreksi, tujuan validasi itu sendiri adalah untuk mencocokkan data yang dikirim oleh Pusat dengan kriteria kepesertaan PKH. Jika dalam validasi terdapat temuan bahwa peserta tidak memenuhi kriteria PKH, maka ia akan dihapus dari data yang ada. Begitu juga jika dalam temuan lapangan bahwa ada peserta yang tidak terdaftar namun ia memenuhi kriteria PKH, maka dengan adanya validasi pihak Unit Pelaksana dapat mendaftarkan ia sebagai peserta PKH. Dan penyaluran bantuan dilakukan setiap 3 bulan sekali yang dilakukan selama 4 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya verifikasi, verifikasi berupa pengecekan kewajiban peserta terhadap penggunaan dana bantuan yang diberikan, verifikasi dilakukan pada fasilitas pendidikan dan kesehatan dimana peserta terdaftar. Dengan adanya verifikasi

adalah untuk mengurangi atau menghindari kecurangan dalam penggunaan dana bantuan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah pertemuan kelompok, pertemuan kelompok sendiri dilakukan setiap bulan, tujuan adanya pertemuan kelompok adalah sebagai tempat berbagi informasi serta pengarahan yang di berikan pendamping kepada peserta PKH berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilihan ini. Secara menyeluruh, perencanaan pelaksanaan PKH yang dilakukan dikecamatan Tembilihan Kota sudah cukup baik, karena segala pelaksanaan kegiatan mengikuti aturan pelaksanaan yang berpedoman pada buku pedoman pelaksanaan PKH yang memuat mekanisme pelaksanaan PKH secara menyeluruh untuk semua daerah yang ada di Indonesia.

Perencanaan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Kabupaten Indragiri Hilir sebagai dasar dalam melaksanakan sebuah Program Keluarga Harapan (PKH). Kemampuan dalam melaksanakan sebuah perencanaan awal tidak terlepas dari keahlian dan pengetahuan pengelola program itu sendiri mengenai tujuan dan sasaran yang akan diperoleh. Sebab perencanaan awal akan memberikan kontribusi sangat penting yang positif bagi pengelola dalam mewujudkan visi dan misi sebuah program tersebut.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerjasama dengan secara efisien dan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Secara umum batasan pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-

alat, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga memebntuk suatu wadah (organisasi) yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pecapaian tujuan dan harus jelas pembagian tugas (staffing) dan kordinasi nya. Untuk melihat kedua indikator staffing dan kordinasi , peneliti melakukan wawancara dengan informan :

“Berkaitan dengan pembagian tugas setiap staff dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan ini, sudah tercantum pada buku pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang di keluarkan oleh Kemensos. Dimana pada struktur jabatan nya terdiri dari Kepala atau Pembina yang menjadi ketua penanggung jawab pelaksana, Bendahara, koordinator kabupaten, operator, dan terakhir pendamping. Sebagai pembina saya bertanggung jawab untuk merangkul semua staff saya agar dapat bekerja secara harmonis dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang di berikan pada mereka, secara khusus juga saya sekaligus melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan yang dilakukan di lapangan. Dan untuk tugas koordinator kabupaten, memastikan setiap pelaksanaan yang dilakukan baik itu validasi penyaluran dan verifikasi yang dilakukan oleh pendamping di laksanakan selesai tepat waktu sesuai jadwal yang berikan oleh pusat, dan tugas untuk pendamping ia yang akan turun langsung kelapangan untuk melakukan validasi, mendampingi peserta pada saat penyaluran dan memastikan bahwa tidak ada peserta yang tidak menerima bantuan pada saat penyaluran, hingga pada verifikasi, pendamping akan melakukan pengecekan ke setiap mitra kerja seperti balai kesehatan atau puskesmas, ke sekolah-sekolah untuk memastikan bantuan tersebut sudah di gunakan sesuai komponen kebutuhan mereka”. (Wawancara Bapak Syaiful Kelana S.Pd Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir 07-Juli-2017)

Dan untuk Melihat bagaimana kordinasi yang dilakukan, peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai berikut :

“Untuk penyaluran ini pihak Unit Pelaksana PKH Kecamatan Tembilahan bekerjasama dengan pihak kantor pos sebagai mitra kerja khusus dalam penyaluran bantuan. Dan penyaluran ini dilakukan di kantor pos untuk di semua daerah di Indonesia. Kalau dalam penyaluran bantuan PKH sejauh ini sudah cukup baik, hanya saja kalau dalam masalah penyaluran ini yang kadang tidak tepat waktu. Misalnya yang seharusnya penyaluran itu dilakukan pada periode sebelumnya malahan dana bantuannya keluar pada periode berikutnya. Jadi pada periode berikutnya itu peserta mendapatkan bantuan dana dua kali. Seringnya terjadi keterlambatan pembayaran, ini dikarenakan anggarannya kan dari Pusat sehingga proses pengiriman bantuan memakan waktu yang cukup lama”. **(Wawancara dengan Bapak Mirza Padmaraga Kordinator PKH Kabupaten Indragiri Hilir, 07-Juli-2017)**

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi mengenai pembagian tugas bagi setiap staff, peneliti melakukan wawancara dengan pendamping kecamatan terkait tugas yang diberikan, sebagai berikut :

“Untuk tugas masing-masing posisi sudah tercantum didalam buku pedoman pelaksanaan PKH, jadi kami sebagai SDM tinggal menjalankan apa yang sudah ditugaskan. Untuk tugas saya sendiri sebagai pendamping itu lebih banyak dari posisi staff yang lain. Karena didalam buku pedoman pelaksanaan, pendamping sebagai orang yang berdekatan langsung dengan peserta, baik sebagai yang memberikan informasi, mengarah peserta, memberikan motivasi agar para peserta bisa menyadari betapa pentingnya untuk keluar dari kemiskinan dan

mengangkat perekonomian mereka. Untuk itu tugas dari pendamping hampir keseluruhan kegiatan utama yang ada di buku pedoman itu, kami yang bertanggung jawab, mulai dari validasi, penyaluran, verifikasi hingga pertemuan kelompok”

(Wawancara dengan Kak Faizah Husna S.Pd Pendamping PKH Kecamatan Tembilahan 09-Juli-2017)

Kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai staffing adalah dalam pelaksanaan PKH dibentuk Unit Pelaksana sebagai wadah berkumpulnya SDM pelaksana yang menjalankan setiap kegiatan daripada PKH ini, dalam struktur kepengurusannya Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Tembilahan terdiri dari 1 orang pembina, 1 orang koordinator kabupaten, 2 orang operator dan 3 orang pendamping. Berkaitan dengan pemilihan atau perekrutan SDM pelaksana, untuk posisi operator dan pendamping dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial. Untuk posisi pembina yang bertanggung jawab berjalannya kegiatan pelaksanaan PKH di Kabupaten Indragiri Hilir di isi oleh Kabid bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial yang di pilih langsung oleh Kepala Dinas sosial. Untuk posisi koordinator kabupaten di pilih berdasarkan kesepakatan seluruh pegawai yang ada di unit pelaksana. Dengan adanya pembagian tugas bagi staff pelaksana, diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal melihat dan bisa menjalankan tugasnya masing-masing secara efektif.

3. Pengarahan/Perggerakkan (Actuating)

Pengarahan adalah usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran anggota-anggota organsasi tersebut. Pengarahan merupakan suatu kegiatan memimpin, memilih dan

memberikan arahan dan penilainan terhadap para pekerja sehingga mereka akan bekerjasama secara baik untuk mencapai rencana.

Pengarahan banyak dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mengarahkan kepada tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan, bagaimana proses yang sebenarnya dan yang baik serta pemberian motivasi agar pegawai lebih semangat dalam bekerja. Khususnya dalam kegiatan pelaksanaan PKH ini pengarahan yang dilakukan ialah memberikan pengarahan, motivasi dan komunikasi secara pendamping dan pengendalian serta pemberian informasi kepada RTSM peserta PKH mengenai pentingnya PKH ini, kemudian peningkatan kemampuan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dibuat dalam pertemuan kelompok yang dilakukan oleh pendamping. Maka dari itu untuk mengetahui prosedur dan kegiatan pengarahan yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Tembilahan maka peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Setiap pelaksanaan kegiatan selalu diberikan pengarahan, begitu juga apabila terjadi permasalahan mengenai pelaksanaan PKH. Pengarahan itu dilakukan oleh Koordinator Kabupaten (Korkab). Korkab akan menyampaikan informasi-informasi penting seperti kapan harus melakukan validasi, penyaluran, dan verifikasi kepada masing-masing pendamping PKH Kecamatan, barulah peserta PKH secara langsung juga diberikan pengarahan oleh pendamping Kecamatan kepada KPM peserta PKH secara langsung melalui pertemuan kelompok. Maka dari itu motivasi berupa penambahan honor sebagai pelaksana juga sebagai motivasi tersendiri bagi mereka agar dalam bekerja mereka selalu bersemangat dan pekerjaanpun selesai tepat waktu”. (Wawancara dengan Bapak Syaiful

Kelana S.Pd Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, 07-Juli-2017)

Untuk mengetahui pengarahan yang diberikan oleh Pendamping Kecamatan kepada peserta PKH di Kecamatan Tembilahan, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

“Saya selaku pendamping PKH Kecamatan selalu memberikan pengarahan kepada KPM mengenai pelaksanaan PKH dan bagaimana proses pengambilan bantuan PKH tersebut. Peran saya sebagai pendamping tak hanya sebagai wadah memberi informasi saja, tetapi juga sebagai tempat mereka melakukan pengaduan, memberi masukan, kritik selama kegiatan baik dari tahap validasi hingga penyaluran yang dilakukan. Tanggung jawab saya sebagai pendamping untuk memastikan bahwa peserta saya tidak ada yang tidak menerima bantuan. Kegiatan ini dilakukan pada saat pertemuan kelompok yang dilakukan setiap bulannya. Bagi saya motivasi selain honor yang diberikan, adalah semangat para peserta yang membuat saya selalu ikhlas melakukan pekerjaan ini terlebih lagi melihat senyum bahagia bagi mereka yang merasa terbantu dengan adanya program ini”. (Wawancara dengan Kak Faizah Husna S.Pd Pendamping PKH Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, 09-Juli-2017)

Untuk mendapatkan informasi tambahan dilakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Kecamatan Tembilahan yang mendapatkan bantuan PKH, yaitu sebagai berikut:

“Pada saat pertemuan kelompok biasanya akan diberikan pengarahan oleh pendamping PKH Kecamatan berupa bagaimana tata cara pengambilan bantuan PKH yang dilakukan di kantor pos, ada motivasi supaya kita tetap komitmen

menjalankannya sebagai peserta PKH, Selain itu biasa nya kami juga diberi keterampilan agar nantinya ketika kita tidak menerima bantuan lagi kita bisa membuka usaha kecil-kecilan dari keterampilan yang kita peroleh pada saat pertemuan kelompok setiap bulannya itu”.
(Wawancara dengan Ibu Misliani, 09-Juli-2017)

Dari hasil wawancara secara keseluruhan mengenai pengarahan, peneliti menarik kesimpulan bahwa saat sebelum melaksanakan kegiatannya selalu diberikan pengarahan terkait pelaksanaan yang akan dilakukan kepada setiap staff, dan sebagai bentuk motivasi yang diberikan, pihak unit pelaksana juga memberikan tambahan honor kepada setiap staff guna meningkatkan semangat kerja, dan untuk pengrahan secara keseluruhan mulai dari akan melaksanakan kegiatan hingga pengarahan yang diberikan oleh pendamping kepada peserta sudah baik, segala bentuk informasi yang perlu di sampaikan selalu di informasikan kepada para peserta. Hal ini bisa kita lihat dari tanggapan peserta PKH berkaitan dengan pengarahan yang diberikan, segala informasi terbaru mengenai pelaksanaan PKH sealu di berikan pendamping pada saat melakukan pertemuan kelompok dengan para peserta. Dengan adanya pengarahan yang diberikan, diharapkan tidak adanya komunikasi yang salah dan informasi yang tidak tersampaikan. Dengan adanya pengarahan ini bertujuan agar komunikasi serta hubungan baik antar staff dalam unit pelaksana, maupun unit pelaksana dengan masyarakat atau peserta terjalin hubungan yang harmonis guna memperlancar dan saling mendukung terhadap kesuksesan pelaksanaan PKH ini.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja da apabila perlu menerapkan tndakan-tindakan

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan adalah hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dan kenyataan (*dassien*) dengan hasil yang diinginkan (*dassollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan. Maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut. Maka dari itu untuk mengetahui prosedur dan kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Tembilahan maka peneliti meakukan wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, untuk pengawasan yang dilakukan kami tidak ada membentuk tim khusus pengawasan, itu sendiri saya serahkan kepada pribadi masing-masing staff, mereka harus melaksanakan tugasnya sekaligus mengawasi tindakan yang ia lakukan. Dan untuk pengawasan pada saat tahap penyaluran, itu kami lakukan bersama-sama mulai dari saya sebagai pembina, koordinator kabupaten, operator dan pendamping wajib hadir pada saat tahap penyaluran yang dilakukan. Hal ini agar menghindari adanya selisih paham jika nantinya ada masalah dalam penyaluran, jika kita semua turun kelapangan pada saat penyaluran kan kita bisa melihat langsung seperti apa jalannya pelaksanaan tahap penyauran itu”.
(Wawancara dengan Bapak Syaiful Kelana S.Pd Pembina PKH Kabis Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, 07-Juli-2017)

Untuk Melihat pengawasan penyaluran lebih lanjut, maka peneliti melakukan wawancara sebagai berikut :

“Jika pada saat penyaluran ditemukan adanya peserta yang tidak hadir, maka dana bantuan yang peruntukkan untuk ia akan kami konfirmasi kepada pihak

kantor pos agar dana tersebut disimpan dulu sampai peserta tersebut mengambilnya, dan disini pendamping lah bertanggung jawab untuk memastikan agar peserta tersebut dapat menerima haknya, jika tidak pada masa penyaluran kami diberikan waktu selama seminggu untuk menyerahkan bantuan tersebut kepada peserta yang tidak hadir. Dan itu dilakukan oleh pendamping, dan pengambilan dana bantuan pun langsung dikantor pos. Karena kami tidak berhak untuk mengambilkan atau menahan dana bantuan tersebut. Dan Jika selama batas seminggu peserta tersebut tidak juga menerima dana bantuannya, maka dana tersebut akan dikembalikan ke pusat” **(Wawancara dengan Bapak Mirza Padmaraga Kordinator PKH Kabupaten Indragiri Hilir, 07-Juli-2017)**

Untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak pendamping Kecamatan terhadap peserta dalam melaksanakan kewajibannya, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Biasa nya kalau pengawasan kepada peserta PKH di Kecamatan Tembilahan ini biasa nya pihak kecamatan jarang untuk melakukan pengawasan, kalau dari saya selaku pendamping PKH ya pada saat pertemuan kelompok setiap bulannya itu sekaligus dilakukan pengawasan terhadap penunaian kewajiban mereka dalam menggunakan dana bantuan. Karena pertemuan kelompok merupakan salah satu kegiatan dalam proses Pemutakhiran Data. Disitu dilihat apakah mereka memenuhi komitmen mereka atau tidak”. **(Wawancara dengan Kak Faizah Husna S.Pd Pendamping PKH Kecamatan Tembilahan, 09-Juli-2017)**

Pengawasan PKH bertujuan untuk memantau pelaksanaan PKH pada sisi masukan (*input*) dan keluaran (*outputs*). Program pengawasan akan

mengidentifikasi berbagai hal yang muncul dalam pelaksanaa PKH sehingga memberi kesempatan kepada pelaksana program untuk melaukan perbaikan yang diperlukan. Pengawasan yang dilakukan oleh pendamping PKH Kecamatan Tembilahan adalah saat pertemuan kelompok dilakukan, selain itu pendamping juga akan melakukan verifikasi data ke fasilitas kesehatan dan pendidikan yang bekerjasama dengan PKH. Berdasarkan buku pedoman umum PKH tahun 2016, indikator dalam pengawasan pelaksanaan PKH terdiri dari indikator masukan (sumber daya maupun anggran) dan indikator keluarga (produk yang dihasilkan). Kedua kategori ini akan diperoleh dari hasil analisis dan sistem informasi manajemen PKH.

Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasikan tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga ataupun pengawasan yang berobjektif apapun terdiri dari fase sebagai berikut:

- a. Menetapkan alat ukur (standar)
- b. Menetapkan penilaian
- c. Mengadakan tindakan perbaikan

Pada fase pertama pemimpin harus menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Berdasarkan standar tersebutlah kemudian diadakan penilaian. Sedangkan pada fase kedua yakni evaluasi, yaitu membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan dengan standar tadi. Bila terdapat ketidaksamaan maka mulailah fase ketiga yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan dapat direalisasikan.

Pengawasan yang dilakukan pendamping PKH Kecamatan dilakukan pada setiap kali pertemuan kelompok yang

dilakukan, selain itu pendamping juga akan melakukan verifikasi data ke fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang bekerjasama dengan PKH.

B. Faktor- faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat disampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta pada khususnya. Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH). Sosialisasi dilakukan dengan tatap muka antara pendamping PKH dan para stakeholder ditingkat bawah maupun RTSM peserta PKH. Sosialisasi dilaksanakan sebaiknya setahun sekali dikarenakan setiap tahunnya ada pergantian pedoman umum pelaksanaan PKH.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tembilahan harus disediakan sarana dan prasarana salah satu nya untuk kebutuhan sosialisasi dan yang lainnya. Dalam hal sosialisasi membutuhkan tempat atau ruangan untuk melakukan hal tersebut. Bukannya hanya tempat sosialisasi penyediaan fasilitas sekretariat untuk pendamping PKH Kecamatan juga di sediakan. Dari hasil wawancara dengan Pendamping PKH Kecamatan bahwa masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak Kecamatan dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung proses pelaksanaan PKH di Kecamatan Tembilahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilahan ini masih dalam kategori belum optimal, hal ini dapat dilihat dari:

1. Dengan dibuatnya kebijakan Program Keluarga Harapan ini diharapkan agar dapat meringankan dan membantu masyarakat dalam tanggungannya dalam bidang kesehatan dan pendidikan, namun terlepas dari itu tujuan PKH sendiri hanya bersifat sementara selama peserta masih memenuhi kriteria penerima bantuan. Peserta juga diberikan keterampilan kepada peserta, hal ini agar jika peserta sudah tidak mendapatkan bantuan lagi, mereka bisa menerapkan keterampilan yang telah diberikan untuk meningkatkan perekonomiannya dan membentuk kemandirian bagi diri peserta. Untuk itu dalam pedoman pelaksanaannya, peserta masih saja bergantung pada dana bantuan. Hal ini memiliki dua kemungkinan, bias berdampak positif bisa pula berdampak negatif, positifnya adalah peserta bisa mandiri dan dapat memutus rantai kemiskinan keluarganya, dan negatifnya bisa saja peserta hanya mengandalkan dana bantuan peserta hanya menikmati bantuan tanpa ada peningkatan perekonomian dirinya.
2. Sedangkan faktor yang menghambat dalam proses pelaksanaannya adalah kurang meratanya sosialisasi yang diberikan dan kurang nya sarana dan prasarana yang sehingga pekerjaan pendamping tidak maksimal.

B. Saran

1. Dalam hal ini pihak Kabupaten sebaiknya memperhatikan jadwal penyaluran bantuan agar tidak terjadinya keterlambatan penyaluran yang akan dilakukan agar proses pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Meningkatkan sosialisasi lagi sehingga masyarakat Kecamatan Tembilahan mengetahui bahwa ada Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tembilahan dan memperhatikan sarana dan prasarana nya sehingga kegiatan pelaksanaan PKH tersebut berjalan dengan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Tembilahan agar menyediakan sekretariat Khusus untuk UPPKH di setiap Kecamatan dan menyediakan Kantor Pos sendiri di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga warga tidak perlu lagi jauh-jauh datang Ke kantor Pos pusat untuk menerima bantuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, S. Prajudi (1982). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Bintoro Tjokroamidjojo (1984), *Pengantar Administrasi pembangunan*, Jakarta : LP3ES
- Fahmi, Irham (2013). *Perilaku Organisasi. Teori, Aplikasi Dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.
- George R. Terry, 2006. *Principles of Management*. (Alih bahasa winardi), Alumni Bandung.
- Gie, T, Pariata, Westra dkk, 1989, *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta : CV. Haji Masagung.
- Handoko, T. Hani. (1997). *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta.
- J.Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kayatomo, Sutomo. 1985. *Progam Pembangunan*. Bandung: Sinar Baru.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Manullang, M. 1987. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset
- Siagian, Sondang P (1985). *Peranan Staf Dalam Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung
- Siagian, Sondang P. (1986). *Analisis Serta Perumausan Kebijaksanaan Dan Strategi Organisasi*. Gunung Agung : Gunung agung
- Soewarno Handyaningrat. (1997). *Pengantar Studi Administrasi dan Management*. Gunung Agung. Jakarta.
- T. Hani Handoko (2011). *Manajemen*, Edisi : Kedua, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Usman (2009). *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Zuriah, Nurul (2009) *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan : Teori-Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksar